

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Republik Rakyat Tiongkok adalah sebuah negara yang berada di wilayah Asia Timur yang menjadi salah satu negara industri maju bersama dengan Jepang dan Korea Selatan. Pada tahun 1949, Tiongkok memproklamasikan sebagai negara komunis yang diketuai oleh Mao Ze Dong dan hingga sekarang masih bertahan sebagai negara komunis. Tiongkok memiliki wilayah yang sangat luas akibat dari Revolusi Kebudayaan yang pernah terjadi pada tahun 1966 sampai 1976 (Darini, 2010). Dengan wilayah yang sangat luas ini membuat sebagian dari wilayah Tiongkok ada yang berbatasan dengan negara eropa, akibat dari kondisi geografis tersebut membuat penduduk Tiongkok menjadi lebih bervariasi. Perkawinan yang terjadi ini menyebabkan suku yang ada di Tiongkok lebih beragam, tidak sedikit pula dari wilayah Tiongkok merupakan sebuah hasil dari invasi yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok.

Suku Uighur merupakan salah satu suku minoritas di sana. Suku ini merupakan keturunan dari suku kuno yaitu Kerajaan Kekhanan Uighur yang tersebar di Asia Tengah dan memeluk agama islam. Populasi dari suku Uighur juga tersebar di Kazakhstan, Kyrgystan dan Uzbekistan. Suku Uighur dan Suku Han adalah suku di Tiongkok yang memeluk agama Islam tetapi mereka memiliki perbedaan budaya dan gaya hidup. Suku Uighur menganggap mereka secara budaya dan etnis lebih dekat dengan negara dari Asia Tengah. Suku Uighur memakai bahasa Uighur yang merupakan turunan dari bahasa Turki. Sebelum tinggal di Xinjiang, Uighur merupakan kumpulan dari beberapa suku yang berpindah-pindah di Mongolia. Pada sekitar abad ke 8 sampai 9 Masehi, Xinjiang pernah dipimpin oleh Kekaisaran Kekhanan Uighur. Pada saat itu masyarakat etnis Uighur dijuluki “Orang – orang Turkic”.

Gambar 1.1 Peta Provinsi Xinjiang



Sumber: (Thinglink, 2016)

Pada 1933 dan 1944 wilayah ini berhasil memerdekakan kembali Republik Turkistan Timur namun kejayaannya tidak bisa bertahan lama sebab di tahun 1949, wilayah ini berhasil diambil alih oleh pemerintah Tiongkok dan mengubah nama wilayah tersebut menjadi Xinjiang, yang berarti “Batas Baru” (CNNIndonesia.com, 2018). Suku Uighur lebih berdomisili di Provinsi Xinjiang. Xinjiang adalah sebuah provinsi di Tiongkok yang berbatasan dengan negara-negara Islam. Meskipun berdampingan dengan banyak negara Islam hingga saat ini belum memisahkan diri dari otoritas sentral. Perekonomian wilayahnya berputar di sekitar pertanian, perdagangan dan pertambangan. Kota Kashgar merupakan salah satu kota berkembang di Provinsi Xinjiang dan letaknya berada di “Jalur Sutra”.

Xinjiang pernah memproklamasikan diri sebagai Republik Turkistan Timur pada awal 1930an. Berdirinya negara tersebut tidak lepas dari semangat kebangkitan pembaharuan sosial dan politik di kalangan masyarakat suku Uighur setelah runtuhnya Kekaisaran Tiongkok pada tahun 1910 (BBCIndonesia.com, 2009). Wilayah itu kemudian diambil kembali secara penuh oleh Tiongkok yang komunis pada tahun 1949, Xinjiang secara resmi ditunjuk sebagai wilayah otonom Tiongkok, seperti Tibet di sebelah selatan (BBC News, 2014). Pada saat dikuasai oleh Dinasti Qing, Kerajaan Islam Uighur Turkistan Timur mendapat tempat terhormat bahkan mampu memberikan kontribusi besar bagi Tiongkok. Suku Uighur memberikan banyak warisan budaya kepada Tiongkok melalui karangan buku, musik, dan seni akrobat. Kaum muslim Uighur juga pandai menyanyi dan menari, hasil karya mereka masih ada yang tetap populer hingga saat ini.

Tetapi semua berubah ketika Suku Han mulai migrasi secara besar-besaran ke daerah Xinjiang. Akibat perpindahan itu, suku Uighur merasa tersisih dari daerahnya sebab suku Han didukung oleh pemerintah Tiongkok. Semenjak kedatangan suku Han, suku Uighur tidak lagi mendominasi daerah tersebut, karena mereka harus bersaing dengan masyarakat suku Han, dimana mereka lebih fasih berbahasa mandarin dan lebih kompeten. Akibat dari itu semua banyak masyarakat dari suku Uighur harus kehilangan pekerjaan dan jatuh dalam kemiskinan (Authenticated U.S.Government Information, 2007). Hal tersebut menimbulkan pertentangan di kalangan masyarakat suku Uighur. Kelompok warga suku Uighur melakukan serangan kepada pemerintah Tiongkok. Kerusuhan pecah, ketika mereka melakukan penyerangan terhadap polisi menjelang Olimpiade 2008 (BBCIndonesia.com, 2009). Ketika kerusuhan terjadi, Tiongkok mencari cara agar kerusuhan itu tidak kembali terjadi. Ketegangan diantara kedua belah pihak terus terjadi sampai sekarang. Untuk menjaga agar wilayah Provinsi Xinjiang agar tetap aman dan damai, pemerintah Tiongkok membentuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kerja. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kerja mulai beroperasi pada tahun 2002 ini bertujuan untuk melawan ekstremisme dan teroris yang ada di wilayah Xinjiang.

Pembentukan kamp ini menimbulkan respon internasional. Karena pembentukan kamp tersebut, dunia internasional mendesak untuk menghentikan aktivitas kamp pendidikan ulang di Xinjiang (Saputra Y. E., Tempo, 2019). Selain itu pemerintah Amerika melalui Departemen Perdagangan Amerika telah memasukkan 28 entitas Tiongkok kedalam daftar hitam (blacklist). Alasan Amerika melakukan ini karena 28 entitas ini menurut mereka telah melakukan pendidikan terhadap suku Uighur (Kompas.com, 2019)

Tiongkok berusaha untuk mempertahankan provinsi Xinjiang dari kegiatan – kegiatan yang mampu menimbulkan keributan dan perpecahan di wilayah tersebut. Sebab tidak ada suatu negara yang menginginkan sebuah provinsinya untuk lepas dari daerah kekuasaannya. Kebanyakan penelitian yang sudah ada mendasarkan analisisnya terhadap pendekatan permasalahan internal saja. Seperti pada Gita (2017) yang berfokus bahwa konflik di Xinjiang antara Tiongkok dan Uighur merupakan sebuah konflik internal di Tiongkok (Karisma, 2017). Ika (2008) yang lebih berfokus bahwa dikarenakan Tiongkok merupakan negara komunis sehingga sangat berbeda dengan negara – negara lain yang membebaskan setiap warganya untuk beragama sesuai dengan kepercayaan. Akibat dari sikap Tiongkok yang menekan agar islam tidak berkembang sehingga memunculkan permasalahan internal di Tiongkok. Sejalan dengan itu, Nasrullah (2012) berpendapat bahwa fenomena globalisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan konsep nasionalisme di suatu negara sehingga dapat mencegah terjadinya permasalahan internal. Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan permasalahan yang sedang terjadi di antara Tiongkok dan suku Uighur yang menyebabkan hubungan diantara Tiongkok dan suku Uighur tidak harmonis. Penelitian ini akan menggunakan konsep kepentingan nasional, hegemoni, dinamika konflik, dan penyebab konflik. Dengan demikian penelitian ini akan lebih melihat dari sudut pandang pemerintah Tiongkok seperti upaya apa saja

yang dibuat oleh Tiongkok demi mempertahankan Provinsi Xinjiang di tengah tekanan Internasional dan respon Tiongkok terhadap tekanan Internasional tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana upaya Tiongkok dalam mempertahankan Provinsi Xinjiang di tengah tekanan Internasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Memberi gambaran historis konflik di Xinjiang
2. Mengetahui gambaran upaya penyelesaian konflik di Xinjiang

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Memberi gambaran konflik yang terjadi antara Tiongkok dan suku Uighur
2. Memberi gambaran upaya Tiongkok dalam mempertahankan Provinsi Xinjiang ditengah tekanan internasional

1.4 Manfaat Penelitian

1. Akademis

Pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada hubungan internasional khususnya mengenai resolusi konflik terhadap penyelesaian masalah antara negara dengan suku dan upaya negara dalam mempertahankan keutuhan wilayah dalam konflik Xinjiang.

2.Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai upaya suatu negara dalam menjaga keutuhan negaranya.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan kemampuan negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik dan kultural ataupun yang berhubungan dengan power suatu negara. Kepentingan nasional menurut Hans J.Morgenthau memuat berbagai macam hal yang secara logika, kesamaan dengan isinya, konsep ini ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural dalam politik luar negeri kemudian diputuskan oleh negara yang bersangkutan(Coulumbis & Wolfe, 1999). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepentingan nasional sebuah negara bergantung dari sistem pemerintahan yang dimiliki. Peran negara sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memerankan peranan penting dalam hubungan antar negara yang berpengaruh bagi masyarakatnya ataupun hubungan negara terhadap masyarakatnya.

Power pasti selalu berhubungan dengan kepentingan nasional suatu negara, sebab negara akan menggunakan power yang mereka miliki untuk mendapatkan kepentingan nasional yang ingin dicapai. Jika kepentingan nasional itu dapat tercapai maka akan dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakatnya. Sebab masyarakat merupakan suatu hal yang penting bagi kehidupan negara. Oleh sebab itu negara akan melakukan berbagai cara agar warganya merasa aman dan semua kebutuhannya terpenuhi. Kepentingan nasional terdiri dari berbagai macam aspek yaitu kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan militer dan kepentingan sosial – budaya. Agar kepentingan nasional dapat terwujud maka suatu negara harus diakui oleh dunia internasional terlebih dahulu. Dunia internasional

secara konseptual menggunakan kepentingan nasional untuk menjelaskan politik luar negeri suatu negara (Sitepu, 2011).

Fungsi dari kepentingan nasional adalah sebagai panduan dari para pemimpin dalam melakukan hubungan dan patokan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam melakukan hubungan luar negeri. Kepentingan nasional juga sebagai sebuah upaya negara untuk mendapatkan power, yang dimana power adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol terhadap negara lain. Terdapat dua jenis kepentingan nasional yang ingin dicapai suatu negara yaitu pertama, kepentingan yang bersifat vital. Kepentingan vital biasanya berkaitan dengan kelangsungan negara serta nilai inti yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya. Kedua, kepentingan yang bersifat non vital. Kepentingan non vital biasanya berkaitan secara langsung dengan eksistensi negara yang diperjuangkan melalui kebijakan luar negerinya (Jemadu, 2008).

Negara adalah sebagai aktor yang akan berusaha untuk mendapatkan apapun yang dapat membantu dan mempertahankan kepentingan nasional. Salah satu cara yang digunakan negara untuk memenuhi kepentingan nasional adalah dengan cara kerjasama tetapi disamping itu negara harus memiliki sesuatu yang menjual sehingga negara yang diajak bekerja sama segan dan mau untuk bekerjasama. Salah satu kepentingan nasional suatu negara adalah mempunyai kontrol politik. Sebelum membahas lebih lanjut tentang kontrol politik, harus terlebih dahulu mengerti pengertian politik. Politik adalah melakukan kebijakan – kebijakan atau melahirkan keinginan serta kepentingan negara. Kontrol politik adalah tentang substansi politik. Kontrol politik yang diberikan melalui posisi kekuatan yang dipegang oleh personel politik yang berpengaruh sehingga mampu memberikan wewenang untuk menunjuk seseorang, mengizinkan atau menolak partisipasi dalam kelompok formal untuk memberikan keuntungan.

Sebagian besar berkaitan dengan upaya legislator serta kelompok – kelompok kepentingan politik lainnya yang berusaha untuk mengendalikan perilaku

birokrasi(Huber & Shipan, 2002). Ketika hendak melakukan sebuah kontrol terhadap politik, kelompok – kelompok yang menginginkan kontrol itu biasanya memiliki substansi yang bersifat politis namun cara berpikrnya dipengaruhi oleh ekonomi, hal ini pertama kali muncul selama tahun 1970an ketika para ekonom mulai mengeksplorasi organisasi perusahaan bisnis(Moe, 1984). Aktor politik atupun kelompok kepentingan yang sudah mendapatkan kontrol politik maka akan mempengaruhi kebijakan yang akan dipilih. Dalam mewujudkan kegiatannya biasanya para kelompok kepentingan atau aktor politik akan lebih memilih menjauh dalam pemilihan nasional dan lebih memilih birokrat tertentu yang memiliki satu tujuan dengan mereka. Manfaat yang akan didapatkan oleh para kelompok – kelompok yang mampu mendapatkan sebuah kontrol adalah parlemen dapat melakukan kontrol politik atas pekerjaan Pemerintah Federal dan anggotanya dalam berbagai cara.

Dewan Nasional dan Federal dapat mengajukan pertanyaan kepada mereka dan mengungkapkan keinginan dalam bentuk resolusi. Dewan Nasional juga dapat membentuk komite investigasi untuk menyelidiki masalah tertentu dan dapat memberikan suara (Republic of Austria: Parliament, 2018). Dampak dari kontrol politik adalah jika yang memiliki pengaruh terhadap kontrol politik itu menggunakannya secara menyimpang maka akan membuat pemerintah menjadi lebih buruk dan dapat menghancurkan suatu wilayah bahkan negara itu sendiri.

1.5.2. Hegemoni

Hegemoni berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu eugemonia (hegemoni) yang berarti *chief-tain*.(McLean, 1996). Hegemoni bukanlah sebuah hubungan yang mendominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis (Simon, 1999).Konsep Hegemoni berasal dari seorang filsuf dari Italia yang bernama Antonio Gramsci (1891-1937). Konsep hegemoni ini lebih menjelaskan tentang supermasi kelas. Menurutnya supermasi adalah sebuah kelompok yang mewujudkannya dalam dua

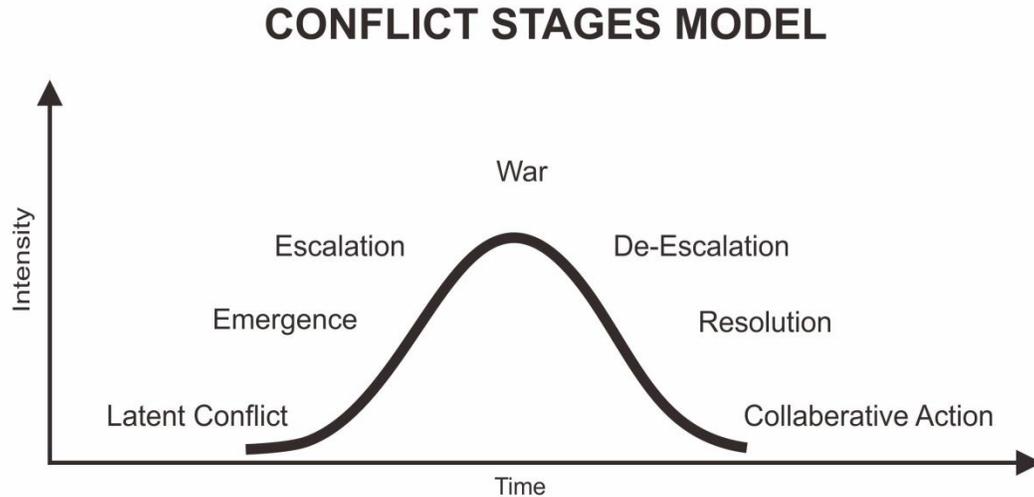
cara yaitu dominasi (represif) dan kepemimpinan intelektual (persuasif). Cara represif atau dilakukan oleh kelompok yang berkuasa dengan cara dominasi sesuatu, sedangkan cara persuasif dilakukan dengan cara lembut melalui konsensus, bertujuan untuk melanggengkan dominasinya tanpa mendapatkan perlawanan.

Hegemoni Gramsci menganalisis berbagai macam relasi antara kekuasaan dan penindasan di dalam masyarakat. Penindasan disini tidak selalu penindasan fisik tetapi bisa berupa penindasan pola pikir. Konsep hegemoni Gramsci ini lebih menggaris bawahi bahwa struktur sosial selalu ada pertarungan untuk memperebutkan penerimaan publik. Pada masalah ini kelompok yang berkuasa akan selalu berusaha untuk membuat masyarakat yang akan dikuasai harus menerima nilai-nilai dan pola pikir dari para penguasa tanpa adanya perlawanan (Chua, 2007). Pada hakikatnya, hegemoni merupakan upaya untuk membawa orang agar menilai dan memandang akan sebuah permasalahan sosial dalam jalan pikir yang telah ditentukan (Mayo, 2010). Hegemoni menunjuk pada kuatnya pengaruh kepemimpinan baik dalam bentuk moral ataupun intelektual, sehingga mampu membuat pola sikap kelas yang dipimpinnya.

Konsensus yang terjadi antara dua kelas ini sengaja diciptakan melalui pemaksaan ataupun sebuah pengaruh yang dibentuk dan disebarkan melalui perangkat-perangkat kekuasaan. Hegemoni juga merujuk pada kedudukan ideologi dari satu atau lebih kelompok di dalam masyarakat sipil yang lebih tinggi daripada yang lainnya (Patria & Arief, 2013). Dalam struktur sosial terdapat sebuah golongan yang berperan untuk mengarahkan pola pikir masyarakat agar sesuai dengan yang diinginkan oleh para pihak penguasa. Orang-orang yang tergabung didalam kelompok ini biasanya orang-orang yang memiliki pengaruh besar ataupun orang terpandang di masyarakat (Aji, 2017). Jabatan mereka digunakan oleh sekelompok orang untuk memuluskan proses hegemoni yang ingin mereka capai untuk pembentukan sebuah pola pikir dari masyarakat.

1.5.3 Dinamika Konflik

Gambar 1.2 Tahapan Konflik



Sumber : Infocore Definition Conflict Phases(Frere & Wilen, 2015)

Jalannya perselisihan dapat menjadi konflik kekerasan dibagi menjadi dua dimensi yaitu intensitas konflik (sumbu vertikal) dan durasi konflik (sumbu horisontal). Garis yang membentuk busur dari kiri ke kanan melintasi diagram menggambarkan jalannya konflik saat akan naik dan turun dalam intensitas dari waktu ke waktu. Bentuk belnya yang melengkung disederhanakan untuk mengkarakterisasi sejarah kejadian. Konflik yang mereda dapat meningkat kembali (United States Institute of Peace, 2008). Kurva dari Konflik Lund menyatakan bahwa konflik dan pengelolaannya terbagi menjadi beberapa tahap yaitu pertama, Konflik Latent. Pada tahap ini menjadi penanda awal dari sebuah kekacauan, meskipun belum memperlihatkan efek. Pada tahap ini bisa diselesaikan dengan diplomasi preventif yang mampu menghambat kelanjutan konflik. Kedua, Emergence. Dari konflik laten dapat berubah dikarenakan terjadi sebuah perselisihan. Di tahap ini dapat meningkat atau berubah menjadi krisis dan dapat juga diselesaikan. Ketiga, Eskalasi. Proses ini tidak dapat diprediksi karena munculnya masalah atau aktor dalam konflik. Namun

eskalasi hanya dapat berlangsung dalam waktu tertentu atau berubah kearah dimana tidak ada pihak yang menang (konflik masih akan terus berlangsung).

Dalam tahap ini dapat melakukan upaya negoisasi bahkan proposal penyelesaian jika sudah tidak ada insentif untuk melanjutkan konflik. Keempat, Perang. Pada tahap perang, tindakan yang diambil adalah perdamaian untuk mengurangi intensitas perang hingga pada tahap akhir melakukan penegakan perdamaian untuk mencegah kembali terjadinya perang. (United States Institute of Peace, 2008). Fase intensitas dapat semakin meninggi apabila perilaku koersif secara sepihak dilakukan seperti ultimatum, sanksi dan kekuatan fisik. Kelima, De-eskalasi. Fase pengurangan seringkali berkaitan dengan kesepakatan atau upaya penyelesaian atau negoisasi yang mengarah pada menciptakan perdamaian. Keenam, Resolution. Jika dalam usaha untuk menciptakan perdamaian telah mendapatkan hasil maka dapat dilanjutkan ke arah fase pemulihan dengan berbagai upaya agar fase ini dapat terus terjadi sehingga mampu menciptakan kondisi yang kondusif (Frere & Wilen, 2015). Tahap akhir dapat terjadi apabila dalam wilayah tersebut sudah tidak ada lagi intensitas konflik dan segala upaya dalam pembangunan perdamaian dapat tercipta sehingga konflik berakhir.

1.5.4 Sebab Konflik

Michael E. Brown (Brown, 1996) membedakan faktor – faktor penyebab timbulnya konflik menjadi empat macam faktor, yakni faktor struktural, faktor politik, faktor ekonomi / sosial dan faktor kultural / budaya.

1. Faktor Struktural

Faktor Struktural ini meliputi negara lemah, masalah keamanan dalam negeri dan geografi etnis, belum mampu mencegah berbagai permasalahan yang terjadi, berubahnya keseimbangan militer antar wilayah, berubahnya pola geografis, belum mampu mengendalikan wilayah, pengurangan bantuan luar negeri. Saat terjadi krisis ekonomi negara, dan korupsi terjadi dimana – mana atau birokrasi dipersulit atau

pembangunan ekonomi ditingkatkan. Ketika struktur negara menjadi lemah, konflik kekerasan terjadi untuk memperebutkan kekuatan antar politik, pemimpin regional ingin berdiri sendiri, antar suku saling berperang, organisasi militer menjadi kuat dan luas, gerakan lintas batas militan, senjata, narkoba meningkat, melebarnya pelanggaran HAM dan masalah kemanusiaan yang rumit. Karena negara yang lemah membuat individu atau etnis atau agama merasa perlu mempersenjatai diri untuk melindungi diri mereka sehingga membuat munculnya dilema keamanan. Negara yang memiliki etnis minoritas lebih sering terjadi konflik antar etnis karena sering terjadi penindasan terhadap etnis minoritas.

2. Faktor Politik

Faktor Politik ini meliputi lembaga politik yang diskriminatif, ideologi nasional yang eksekutif, politik antar kelompok, politik para elit, transisi politis, ideologi – ideologi eksklusif makin menguat, meningkatnya kompetisi antar kelompok, dan menguatnya perjuangan kepemimpinan. Mendiskriminasi institusi politik adalah ketika politik negara hanya terbuka untuk satu etnis saja sedangkan etnis lain tidak sehingga menimbulkan kebencian. Ideologi nasional yang eksekutif adalah nasionalisme hanya berdasarkan etnis tertentu atau agama tertentu saja, prinsip nilai lain. Politik antar kelompok adalah ketika garis – garis primordial memainkan peranan politik sebagai kompetisi akan menyindir etnis lain, supaya menjadi pemimpin sehingga tidak baik. Politik para elit adalah politikus yang ambisius akan mengklaim kekuasaan.

3. Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi ini meliputi sistem ekonomi yang diskriminatif, masalah ekonomi, pembangunan ekonomi, modernisasi, dan berkembangnya ketidakadilan ekonomi. Masalah ekonomi yang terjadi yaitu berupa perubahan pasar disebabkan karena sistem ekonomi dapat menghasilkan pengangguran yang tinggi, inflasi merajalela, sumber kompetisi antar setiap perusahaan atau pedagang sehingga menyebabkan ekonomi yang lemah dan pada akhirnya frustrasi, ketegangan semua ini

adalah akibat dari fragmentasi. Sistem ekonomi yang diskriminatif berdasarkan pada kelas / etnis, kesenjangan ekonomi dan sosial sehingga terjadi konflik. Pembangunan ekonomi dan modernisasi berupa industrialisasi, yang menjadi penyebab konflik, perubahan sosial, migrasi, urbanisasi yang menimbulkan harapan, ketika harapan itu tidak bertemu atau tidak ada menyebabkan frustrasi, ketegangan dan konflik kekerasan serta kebencian atau amarah.

4. Faktor Budaya

Faktor Budaya ini meliputi pola diskriminasi budaya, sejarah kelompok bermasalah, makin menguatnya pola – pola diskriminasi budaya, perendahan dan propaganda etnis. Ketika pola budaya diskriminasi terjadi pada minoritas menyebabkan pendidikan tidak seimbang, dan ketidaksesuaian politik yang dalam mempelajari bahasa minoritas karena tidak diakomodis oleh pemerintah dan ketidakeleluasaan dalam kebebasan memeluk agama. Sejarah kelompok meliputi kebencian dimasa lalu, kelompok (dalam etnis dan agama) cenderung untuk memuliakan sejarah dan budaya mereka sendiri dan mengutuk etnis atau kelompok lain, dan mitologi etnis.

1.6 Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah walaupun Tiongkok berada ditengah tekanan internasional, Tiongkok tetap mempertahankan daerah Xinjiang untuk menjaga kedaulatan negara dan persatuan diatas hegemoni dan kepentingan pemerintah Tiongkok.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Metode Pengumpulan Data

Penulisan ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian riset untuk meneliti dan mengamati peristiwa yang terjadi dalam situasi sosial. Penelitian kualitatif pada umumnya bersifat

deskriptif. Dimana dengan menggunakan metode ini dapat memberikan pemahaman terhadap penyebab suku Uighur yang tidak bisa sepahaman dengan Tiongkok sehingga menyebabkan konflik diantara mereka yang membuat hubungan diantara Tiongkok dan suku Uighur tidak baik serta bahwa kebijakan yang diambil oleh Tiongkok karena dia memiliki kepentingan nasional dan ingin menjaga hegemoni diwilayah Xinjiang. Dalam melakukan pengumpulan data penulis menggunakan *literature research* atau studi kepustakaan. Data – data yang didapatkan dalam studi kepustakaan adalah melalui buku – buku, jurnal, artikel ilmiah, makalah, laporan penelitian, surat kabar maupun website pemerintah ataupun univeristas yang berkaitan dengan kasus dalam penelitian ini. Metode yang juga digunakan dalam pengumpulan data adalah melalui wawancara.

1.7.2 Metode Analisis Data

Penulis akan menganalisis data yang berkaitan dalam kasus yang diambil untuk penelitian ini yaitu melalui reduksi data dan penyajian data. Pertama, Reduksi data. Penulis akan mengumpulkan informasi – informasi yang didapat melalui berbagai sumber dan mereduksinya ke dalam sebuah pola, kategori maupun tema, yang kemudian akan diinterpretasikan dengan menggunakan sebuah skema tertentu.(Creswell, 1994)Pengklasifikasian atau pengorganisasian data ke dalam kategori – kategori didasarkan pada tema, konsep atau kemiripan sifat.(Neuman, 2003)Mengenai kategorisasi dapat berubah sesuai dengan usaha dari penulis dalam menemukan informasi dan memastikan kategorisasi telah dilakukan dengan tepat.Kedua, Penyajian data.Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk sebuah uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, *flowchar*, dan sebagainya.(Sugiyono, 2006) Penulis dalam melakukan penelitian ini akan lebih deskriptif dalam melakukan pengujian terhadap penelitian yang sedang dikerjakan.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian yang terdiri dari metode pengumpulan data dan metode analisis data, serta sistematika penulisan. Pada bab ini menjadi langkah pertama dalam memberikan gambaran umum mengenai isi dari skripsi.

BAB II merupakan bab pembahasan yang terdiri dari penjabaran objek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran terhadap permasalahan yang diangkat di penelitian ini. Dimulai dari sejarah suku Uighur di Tiongkok, sejarah politik suku Uighur di Xinjiang serta kebijakan apa saja yang diambil oleh Tiongkok dalam menghadapi permasalahannya dengan Uighur.

BAB III merupakan bab analisis yang akan menjawab rumusan masalah yang berhubungan dengan mengapa Tiongkok menganggap suku Uighur sebagai ancaman terhadap kontrol politik?. Dalam menjelaskan pertanyaan dari rumusan masalah itu dengan konsep kepentingan nasional dan hegemoni dari data yang sudah dikumpulkan oleh penulis serta melakukan pembuktian terhadap suku Uighur yang dianggap Tiongkok akan mempengaruhi kontrol politik di wilayah Xinjiang.

BAB IV merupakan bab penutup yang berisi sebuah kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai apa saja yang telah ditemukan oleh penulis selama melakukan penelitian ini dan berisi tentang kekerungan – kekurangan dalam penelitian ini.